

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Cahyadi, A. 2023. Hukum Pengawasan. Bandung Barat: PT Remaja Rosdakarya.
- Harahap. (2015). Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Kuantum.
- Ismail., Widiarti, A., Muhadiansyah, D., Koesumah E. 2024. Konflik Komisi Yudisial - Mahkamah Agung - Rencana KY Saring Ulang Hakim Agung MA. Tempo Publishing.
- Kossay, M. 2024. Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-145.
- Nugraha, S. (2024). Metode Penelitian Hukum. Kalimantan Selatan: Penerbit Ruang Karya. 108-111.
- Pusat Data Analisis Tempo. 2021. Pasang Surut Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tempo Publishing.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Taufik, D. (2023). Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Hakim. Jakarta Selatan: Penerbit Damera Press.
- Wajdi, F. (2020). Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wurasto, Ig. (2016). Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yulkarnaini S., dan Zetria E. (2023). Kekuasaan Kehakiman. Tasikmalaya: Penerbit Rumah Cemerlang Indonesia.

Jurnal

- Agung, M., Hasan, Z. 2024. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. 2(2).
- Ariyani, N. 2017. Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Independen. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Bustami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 46(4).
- Rahmani, D.A., Muhayati, S., dan Kholis, I. (2025). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2.
- Faqih, M. (2020). Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1).
- Gusman, D., & Pratama, A. P. R. (2021). Penghubung Komisi Yudisial sebagai pengawasan perilaku hakim berdasarkan kode etik pedoman perilaku hakim. *Communication Quarterly*, 14(3).
- Hasan, N. K., Hipan, N., dan Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3).
- Ikhsan, O. M. (2017). *Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.
- Irawan, S., & Panjaitan, S. P. (2022). Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Lex Lata*.

- Irawan, S. (2025). Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica. *Justici*, 18(2).
- Kristina, A. N. (2024). *Harmonisasi pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menurut Asas Perundang-Undangan dan Perspektif Siyasa Dusturiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Lamijan L., dan Tohari M. (2022). Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1).
- Mulyawan, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(2).
- Noviyanti, T., Herawati, R., & Soemarmi, A. (2019). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial Di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4).
- Qamar, N., dan Rezah, F. S. (2020). *nMetode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Robianto, I. (2016). Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim. *Lex Certa*, 1(1).
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2).
- Safa'at, R. A., dan Ananda, G. A. P. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

- Sakti, L., Susanti, E., dan Rahman, A. (2023). Pengawasan Konstitusional Hakim Pasca Putusan Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(2).
- Salsabila, R. T., Irwandi, I., dan Eriton, M. (2024). Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1).
- Sampara, S. (2017). Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1).
- Setiawan, A. (2016). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1). 58.
- Sindy, Al Zahra N, M., dan Nurjanah N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia*, 3(2).
- Silouw, A. N. (2020). Komisi Yudisial Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Terhadap Perilaku Hakim. *Lexx Administratum*, 8(1).
- Suherman A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1).
- Suparto, S. (2018). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P/KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/IX/2012 – 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Internet

Pengawasan Hakim Tanggung Jawab Bersama, diakses dari komisiyudisial.go.id pada tanggal 25 November 2025,
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15549/pengawasan-hakim-tanggung-jawab-bersama

Sekretariat Jenderal, diakses dari komisiyudisial.go.id pada tanggal 3 Februari 2026,
https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/general_secretariat/about_ky

Repositori Universitas Medan Area, diakses 5 Februari 2026,
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1180/6/118520011_file6.pdf.